

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara maju dengan ekonomi yang kuat dan tingkat kesejahteraan tinggi, Jepang menjadi salah satu tujuan utama bagi para pencari kerja, khususnya dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Motivasi utama para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerja di Jepang didorong oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kesempatan memperoleh penghasilan yang jauh lebih baik dibandingkan standar upah di Indonesia. Gaji yang kompetitif, meski biaya hidup di Jepang tergolong tinggi, tetap memungkinkan TKI untuk mengatur keuangan dengan baik, menabung, dan mengirimkan uang kepada keluarga di kampung halaman guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain aspek ekonomi, bekerja di Jepang memberikan peluang bagi TKI untuk mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan yang berbeda budaya dan bahasa. Jepang terkenal dengan budaya kerja yang sangat disiplin, profesional, dan teratur, yang memungkinkan para pekerja mengembangkan nilai-nilai positif seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, dan etos kerja yang tinggi. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kerja TKI, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja internasional.

Jepang tengah menghadapi tantangan serius terkait kekurangan tenaga kerja yang semakin mendalam akibat perubahan demografi yang signifikan. Populasi Jepang mengalami penuaan yang cepat dengan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai sekitar 29,3% pada 2024, satu angka tertinggi di dunia (Muhammad, 2025). Angka kelahiran yang rendah dan menurunnya jumlah penduduk usia produktif menyebabkan kesenjangan besar dalam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menopang sektor industri dan jasa. Diperkirakan pada tahun 2025, Jepang akan kekurangan sekitar 5 juta tenaga kerja, dan angka ini diprediksi terus meningkat hingga 6,4 juta pada tahun 2030 (Fikriyah, 2023).

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Kekurangan tenaga kerja ini dirasakan di hampir seluruh sektor ekonomi, terutama manufaktur, layanan kesehatan, dan jasa yang padat karya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang melakukan berbagai kebijakan termasuk membuka pintu bagi tenaga kerja asing melalui program Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified Skilled Worker (SSW). Program ini bertujuan untuk mengisi kebutuhan sektor-sektor yang mengalami kekurangan dengan pekerja migran terampil dan semi-terampil, termasuk dari Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang tenaga kerja terbesar di Jepang.

Meski peluang kerja bagi tenaga kerja asing terbuka luas, kelakuan buruk sebagian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jepang seperti pelanggaran hukum, penyalahgunaan visa, tindak kriminal seperti pencurian, kekerasan, dan perilaku tidak profesional telah mencoreng citra tenaga kerja Indonesia di mata publik dan media lokal Jepang.

Salah satu fenomena yang memicu urgensi penelitian ini adalah maraknya kasus kriminalitas yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang bernama Rohmat Hidayat, seperti insiden pembegalan yang terjadi di Fukuoka pada Juli 2024. Dalam kasus tersebut, seorang peserta magang asal Indonesia diringkus kepolisian Jepang setelah melakukan perampokan terhadap seorang wanita lokal demi mendapatkan uang tunai yang ironisnya hanya berjumlah 600 Yen. Kasus tersebut mengungkap bahwa tindakan nekat ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh faktor tekanan ekonomi yang ekstrem. Banyak pekerja migran terjerat utang besar kepada oknum Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Indonesia dengan biaya keberangkatan yang membengkak hingga ratusan juta rupiah akibat praktik ilegal penahanan ijazah dan bunga pinjaman bank yang tinggi. Akibatnya, pekerja seperti pelaku dalam kasus ini harus mengirimkan hampir seluruh gajinya (sekitar 9 juta dari 10 juta Yen) untuk melunasi utang di tanah air, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan psikologis yang hebat di Jepang.

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Permasalahan ini masuk ke dalam kajian konflik sosial karena mencerminkan adanya pertentangan kepentingan dan ketimpangan struktur antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses migrasi tenaga kerja. Konflik sosial yang dimaksud dalam konteks ini adalah konflik struktural dan konflik kepentingan yang muncul dari sistem rekrutmen yang eksploitatif. Hal ini melibatkan ketegangan antara pekerja migran yang berusaha mencari kesejahteraan dengan oknum lembaga pengirim (LPK) atau lembaga penyalur di Jepang (Kumiai) yang sering kali lebih mementingkan keuntungan finansial daripada perlindungan pekerja. Selain itu, insiden kriminal ini memicu konflik sosial dalam bentuk stigma dan persepsi negatif dari masyarakat lokal Jepang terhadap komunitas Indonesia secara keseluruhan, yang mengancam harmoni interaksi antar budaya.

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia di Jepang bekerja di sektor informal, seperti sebagai asisten rumah tangga, buruh pabrik, dan pekerja layanan lainnya, karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan formal yang mereka miliki. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi BNP2TKI (2013), mayoritas TKI hanya memiliki latar belakang pendidikan setingkat sekolah dasar hingga menengah pertama (Ali, 2023). Ketidakmampuan mereka untuk memahami aturan dan tata tertib di negara asing akibat keterbatasan pengetahuan ini seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka terlibat dalam pelanggaran hukum dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Jepang. Keterbatasan bekal pengetahuan dan keterampilan juga turut memperbesar risiko mereka menghadapi berbagai tantangan di tempat kerja. Para pekerja sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya kerja yang sangat disiplin dan sistematis di Jepang, serta minimnya pemahaman atas hak dan kewajiban mereka sebagai tenaga kerja migran. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap pelanggaran, termasuk tindak kekerasan, penyalahgunaan visa, dan pelanggaran terhadap aturan lokal. Selain faktor internal dari aspek pendidikan dan keterampilan, kondisi sumber daya manusia di Indonesia sendiri

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

juga turut berkontribusi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar calon TKI yang diberangkatkan ke Jepang belum mendapatkan pelatihan keterampilan yang memadai, baik dari lembaga pelatihan resmi maupun program pemerintah. Mereka lebih banyak berasal dari latar belakang pendidikan rendah dan minim pengalaman kerja profesional, sehingga ketika mereka menghadapi kondisi nyata di lapangan, mereka kurang mampu mengelola tantangan dan tekanan yang muncul. Banyak dari mereka yang belum memahami tata cara bekerja, aturan adat, maupun peraturan hukum di Jepang. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang menawarkan solusi instan atau menjerumuskan mereka dalam praktik ilegal, seperti penyalahgunaan visa, overstay, dan bahkan kegiatan kriminal. Kasus pelanggaran yang melibatkan TKI Indonesia, mulai dari pencurian, perampokan, hingga tindak kekerasan, terkadang mendapatkan sorotan media, yang menciptakan stereotip negatif terhadap seluruh komunitas tenaga kerja Indonesia di Jepang. Dampaknya tidak hanya memperburuk citra, tetapi juga memberi pengaruh negatif terhadap kebijakan pemerintah Jepang dalam pengelolaan tenaga kerja asing, termasuk pembatasan kuota dan pengetatan proses rekrutmen.

Terkait pengaduan, laporan mencatat 1.500 aduan pada Tahun 2024, menurun 24,81% dibanding tahun sebelumnya. Pengaduan paling banyak berasal dari Malaysia, disusul Taiwan, Saudi Arabia, Hong Kong, dan Kamboja, dengan pengaduan langsung menjadi metode pengaduan terbanyak (*BP2MI, 2025*). Pengaduan ini mencakup berbagai permasalahan serius mulai dari tindak kekerasan, pelecehan seksual, pelanggaran kontrak kerja, hingga berbagai pelanggaran hukum lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan TKI. Permasalahan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menimbulkan dampak luas yang mencerminkan profesionalisme TKI di mata dunia internasional. Sebagai representasi negara, kualitas dan perilaku TKI sangat berpengaruh terhadap citra Indonesia di panggung global. Ketika para pekerja

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

migran mampu menjaga integritas kerja, disiplin, serta mematuhi aturan hukum dan norma sosial di negara tujuan, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan negara tujuan terhadap Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja yang profesional dan andal. Sebaliknya, tingginya angka pelanggaran menyebabkan asumsi negatif yang bisa berdampak pada kebijakan berupa pembatasan kuota, pengetatan regulasi, dan bahkan penutupan akses pasar kerja di negara tujuan, seperti yang terjadi pada beberapa sektor di Jepang. Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menangani permasalahan ini secara sistematis. Upaya utama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa para TKI mendapatkan pelatihan keterampilan dan edukasi yang memadai sebelum diberangkatkan. Pelatihan ini perlu mencakup aspek teknis sesuai dengan jenis pekerjaan, serta pemahaman terhadap hukum, budaya, dan tata tertib di negara tujuan kerja. Profesionalitas TKI menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian negara lain terhadap kemampuan dan kualitas tenaga kerja Indonesia. Pemerintah perlu memberi ketegasan regulasi terutama menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh para TKI agar para pengguna jasa hingga masyarakat di negara asing bisa memandang kualitas dan profesionalisme tenaga kerja dari Indonesia dengan baik. Tak hanya diberlakukannya regulasi, namun juga harus ada program pelatihan kerja yang lebih baik, pengawasan ketat terhadap lembaga perekrut dan seleksi lebih agar terbentuknya sumber daya manusia untuk para TKI yang berkualitas sebelum diberangkatkan ke negara asing. Regulasi berupa Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah serta seleksi sumber daya manusia menjadi bekal bersama dalam hal mengawasi profesionalitas antara pemerintah, tenaga kerja, dan pengguna jasa TKI. Diperlukan kerjasama yang baik bukan hanya antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing, namun juga pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya agar terjadi situasi yang harmonis dan masing-masing pihak dapat menerima manfaat baik.

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang. Pratama dan Srimulyani (2024), misalnya, melalui studi berjudul “Adaptation Strategy of Indonesia’s Tokutei Ginou Workers: Case Study of Hokkaido’s Hospitality Industry” menunjukkan bahwa pekerja dengan skema visa tokutei ginou masih berjuang menyesuaikan diri dengan pola hidup dan etos kerja masyarakat Jepang. Tantangan tersebut tidak hanya menyangkut perbedaan budaya dan ritme kerja yang lebih ketat, tetapi juga hambatan bahasa serta keterbatasan ruang dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan religius, seperti tempat ibadah di area tempat tinggal mereka. Di sisi lain, kajian yang dilakukan oleh Guntara, Nashira, dan Do Carmo (tahun terbit tidak disebutkan) melalui “Studi Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia” menegaskan bahwa banyak PMI rentan mengalami kekerasan, kriminalisasi, serta pelanggaran hak-hak hukum. Temuan mereka memperlihatkan urgensi peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja migran, terutama karena sejumlah kasus perdagangan manusia (TPPO) dan eksploitasi masih terus terjadi di negara penempatan. Melengkapi gambaran tersebut, penelitian normatif dari Judicatum (2023) menelaah perlindungan hukum bagi PMI yang berada dalam status overstay di Jepang melalui skema Government-to-Government (G2G) maupun jalur visa Specified Skilled Worker (SSW). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia maupun Jepang masih jauh dari memadai. Fokus kebijakan cenderung berat pada aspek penempatan tenaga kerja, sementara peningkatan kesejahteraan dan jaminan hak-hak pekerja di negara tujuan kurang mendapatkan perhatian yang proporsional.

Maka dari itu, Penelitian ini penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Jepang karena mengkaji secara mendalam dinamika kerjasama ketenagakerjaan yang menjadi salah satu pondasi utama hubungan kedua negara. Melalui penelitian ini, dapat dipahami tantangan konkret yang dihadapi oleh

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

tenaga kerja Indonesia di Jepang, termasuk masalah profesionalisme dan perilaku, serta dampaknya terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Hasil penelitian akan memberikan gambaran tentang respons, strategi, serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jepang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana desain kerja sama antara Jepang dan Indonesia dalam penanganan masalah ketenagakerjaan? Pertanyaan ini berangkat dari pentingnya memahami bentuk, mekanisme, serta efektivitas kerja sama bilateral kedua negara dalam mengelola isu tenaga kerja yang bersifat transnasional. Selain itu, rumusan masalah ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana kebijakan dan perjanjian kerja sama yang disepakati mampu menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang yang terus meningkat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bentuk dan mekanisme kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana kedua negara merancang kebijakan dan perjanjian bilateral yang dapat mengatasi tantangan yang muncul, seperti kekurangan tenaga kerja di Jepang, pelanggaran hukum oleh sebagian TKI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja sama tersebut, baik dari sisi diplomasi, kebijakan domestik, maupun implementasinya di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai arah dan dampak kerja sama Indonesia–Jepang di bidang ketenagakerjaan.

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

1.4 Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam bidang diplomasi tenaga kerja. Melalui analisis hubungan Indonesia–Jepang, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana isu ketenagakerjaan dimasukkan dalam agenda kerja sama bilateral serta bagaimana masalah dalam negeri dapat memengaruhi dinamika hubungan antarnegara. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak pemerintah dan lembaga terkait, mengenai bentuk dan tantangan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja migran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan Penelitian ini tentang kerja sama Indonesia-Jepang dalam penanganan isu ketenagakerjaan disusun secara sistematis dalam lima bab utama agar penelitian memiliki alur yang logis dan ilmiah. Bab I Pendahuluan berisi uraian latar belakang yang menjelaskan konteks permasalahan tenaga kerja Indonesia di Jepang, meliputi faktor ekonomi, sosial, dan demografi yang mendorong kerja sama kedua negara. Bagian ini juga menjelaskan rumusan masalah utama, yaitu bagaimana desain kerja sama Jepang-Indonesia dalam penanganan isu ketenagakerjaan, dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang meliputi analisis perilaku tenaga kerja migran Indonesia, kajian persepsi publik Jepang, dan pemberian rekomendasi kebijakan. Bab ini diakhiri dengan uraian tentang manfaat penelitian ini pada tataran teoretis bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional dan studi migrasi serta manfaat praktis lainnya bagi pemerintah, lembaga pelatihan kerja, dan calon tenaga kerja migran disertai dengan sistematika penulisan tesis secara singkat.

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Bab II Tinjauan Pustaka berfungsi sebagai landasan teoretis penelitian yang memuat teori-teori seperti teori kerja sama bilateral, teori konflik, serta konsep Pekerja Migran Indonesia. Pada bagian ini juga disertakan konsep dasar terhadap penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan penelitian yang akan diisi oleh skripsi ini. Bab ini kemudian ditutup dengan penyusunan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara teori, kebijakan kerja sama, dan persepsi publik terhadap TKI di Jepang.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan. Objek penelitian difokuskan pada kerjasama antara Indonesia dengan Jepang terhadap masalah ketenagakerjaan dengan berbagai studi kasus seperti kriminalitas dan persepsi publik terkait tenaga kerja Indonesia di Jepang. Data diperoleh dari sumber primer seperti wawancara dengan narasumber Jepang dari VR Chat serta luring dan Bapak Ali Nurdin selaku Ketua Umum Buruh Migran Nusantara, serta sumber sekunder berupa berita, jurnal, dan unggahan Twitter/X. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis wacana media sosial, sedangkan analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis wacana kritis dan analisis tematik dengan validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

Bab IV berisi pemaparan temuan penelitian yang dianalisis dengan merujuk pada kerangka teoretis yang telah dibahas sebelumnya, diawali dengan gambaran umum profil pekerja migran Indonesia di Jepang sebagai konteks sosial penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kasus-kasus yang merefleksikan munculnya persoalan sosial, termasuk insiden kriminal di Fukuoka tahun 2024, untuk melihatnya dalam kerangka konflik sosial serta dampaknya terhadap relasi antara pekerja migran dan masyarakat setempat. Bagian ini juga mengkaji persepsi publik Jepang berdasarkan wacana media sosial dan hasil

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

wawancara dengan informan Jepang, sekaligus membandingkan pekerja migran Indonesia dan negara lain dalam aspek adaptasi sosial serta penerimaan masyarakat guna memahami perbedaan pola integrasi dan potensi ketegangan. Selanjutnya, dianalisis pula peran media Jepang dalam membentuk narasi mengenai pekerja migran yang dapat memperkuat persepsi negatif, sebelum akhirnya pembahasan diarahkan pada implikasi kebijakan dalam kerja sama Indonesia–Jepang, termasuk dinamika perubahan program TITP menuju SSW serta upaya peningkatan perlindungan pekerja migran oleh pemerintah Indonesia, sehingga keseluruhan bab ini menempatkan persoalan yang muncul tidak hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola kebijakan dan hubungan kelembagaan kedua negara.

Bab V memuat ringkasan temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah secara menyeluruh, dengan menekankan bagaimana perilaku sebagian pekerja migran, dinamika pemberitaan media, serta kebijakan kedua negara memengaruhi posisi sosial pekerja Indonesia di Jepang dalam konteks munculnya persoalan dan penanganannya. Bagian saran ditujukan kepada pemerintah, lembaga PMI untuk memperkuat sistem regulasi, pengawasan, dan pembekalan calon pekerja migran, kepada pemerintah Jepang untuk mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan inklusif, serta kepada peneliti selanjutnya agar memperluas kajian melalui pendekatan kuantitatif atau studi perbandingan lintas negara sehingga pemahaman mengenai isu ini menjadi semakin komprehensif.

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]